

1 Juni 1945
part 2

dirikan ? Oleh anggota yang terhormat Moh. Hatta dan lain-lain pembicara dikemukakan 3 soal ialah, pertama apakah Indonesia akan berdiri sebagai persekutuan negara (semitetstaat) atau negara serikat (Stateland) atau sebagai persekutuan negara (Staatenbond). Kedua, dipersoalkan perbandingan antara Negara dan Agama, dan ketiga apakah Republik atau Monarki. Menyerot pendapat saja, hadirin yang terhormat, sebelumnya kita membiarkan soal persekutuan negara, atau negara serikat, republik atau Monarki, terlebih dahulu kita harus membiarkan soal yang disebut negara itoe, negara menyerot dasar pengertian men, oleh karena segala pembentukan asosiasi negara itoe tergantung daripada dasar/pengertian negara (Staats-idea) tadi.

Tentang persateuan negara atau negara serikat atau tentang Republik atau Monarchi
 itoe, sebetolnja memeroet pendapat saja, soal hantak seseorang nagara. Maka se-
 karang saja hendak menbitjatakan dasarnya nagara Indonesia Merdeka. "Nagara" memoe-
 roet dasar pengertian (Sitarsides) apa ?

Sebagai toean-toean telah mengetahui, dalam ilmu negara kita mendapat beberapa teori, beberapa aliran pikiran tentang negara. Marilah dengan singkat kita meminjau teori-teori negara itoe.

1. Ada satu aliran pikiran yang menyatakan, bahwa negara itu terdiri atas dasar teori peranan, teori individualistik, sebagai diadarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke (abad ke 17), Jean Jacques Rousseau (abad ke 18), Herbert Spencer (abad ke 19), H.J.Laski (abad ke 20).

Menurut aliran pikiran ini, negara ialah masyarakat hukum (legal society) yang didasarkan atas kontraknya seseorang seseorang dalam masyarakat itu (contract social). Sehubungan hukum negara yang berdasar individualisme terdapat di negeri Eropa Barat dan di Amerika.

2. Aliran pikiran lain tentang negara ialah teori, "golongan" dari negara (class theory) sebagai diajarkan oleh Marx, Engels dan Lenin. Negara dianggap sebagai alat dari sesenat golongan (sesenat class) untuk menindas kelas lain. Negara ialah alatnya golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan-golongan lain, yang mempunyai kedudukan yang lemah. Negara kapitalistik, ialah perkakasan bourgeois untuk menindas kaum borsoek, oleh karena itoe pada Marxis mengandjarkan revolusi politik dari kaum borsoek untuk meroboh kedudukan negara agar kaum borsoek dapat ganti menindas kaum bourgeois.

3. Alasan pikiran ini lagi dari pengantar negara ialah, teori yang dapat dimasukkan teori integralistik yang diadopsikan oleh Spinoza, Adam Müller, Hegel, dll. (abad 18 dan 19). Menurut pikiran ini negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat secara keseluruhannya sebagai persatuan. Negara ialah seperti seseorang masyarakat yang integral, segala golongan, segala badan, segala anggota berhubungannya erat

[illegible]

Seenggach benar, dasar dan bentuk seseorangnja associate negara itoe berhubung dengan erat dengan rimajat beekem (Rechtsgesichte) dan lembaga sosial (social structure) dari negara itoe. Berhubung dengan itoe apa jeng baik dan adil entotok seseorang negara belasan tante baik dan adil entotok negara lain, oleh karena keadaan tidak sama.

Tiap-tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri berhubung dengan
sifat dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu politik pembangunan negara In-
donesia harus disesuaikan dengan social structure masyarakat Indonesia, yang akan
pada masa ~~sebelum~~, serta harus disesuaikan dengan pengaruh zaman, misalnya tita-
tita negara Indonesia dalam lingkungan Asia Timur Raya.

Begitu mendengar ini marilah kita melihat tjoetah-tjoetah dari negara-negara lain. Besar seseorang hoesken negara Eropa Barat ialah perseroenan dan liberalisme. Sifat perseroenan ini, juga mengambil segala lapangan hidup (istim oending-oending ekonomi, kesenian dan lain-lain), menjadi-dibahken manoesia sebagai seseorang dari manjerantja, mengesahkan diri dari segala pegoelan juga lain. Seseorang manoesia dan negara juga dianggap sebagai seseorang pula, selaloe menjari dijalan oetoeck merobek kekeasaan dan keajaian benda. Segala-gelamja itoe menjadi-bekken superieline dan distim maneres (uitbuitingsysteem), menjadi katjan-belaunja domie lair dan batin.

Troen-troen telah mengerti sendiri bahwa sifat demikian harus kita jalankan dari pembangunan negara Indonesia, bahkan Eropa sendiri pada waktu sekarang mengalami krisis vertikal yang makin hebat berkebalikan dengan jiwa rakyat Eropa telah dilanda keadaan keapakan; sebagai akibat selangit peracungan tersebut.

Dasar perekonomian negara Sovjet Rusia pada masa sekarang, ialah ditetapkan dari proletariat. Oleh jadi dasar itoe sesuai dengan keistimewaan keadaanja sosial

dari negeri Rusia, akan tetapi dasar pengertian negara itoe bertentangan dengan sifat masyarakat Indonesia jang asli.

Lain negara, ialah negara Jerman nasional sosialis sebelumnja menjerak dalam peperangan sekarang. Negara itoe berdasar atas aliran pikiran negara totaliter, "das Ganze der politischen Einheit des Volke (integrative theory). Prinsip "Führerprinzip" (Führung) sebagai Kerabegriff ein totaler Führerstaat, dan sebagai Prinsip jang dipakainya djoega ialah perasaan darah dan perasaan darah (Blut und Boden Theorie) antara pimpinan dan rakyat.

Teori-teori jang terhormat, dari aliran pikiran nasional sosialis, ialah prinsip perantaraan antara pimpinan dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara salerochane tjetjak dengan aliran aliran pikiran ketimoran. Kita sekarang meninjau negara Asia, ialah dasar Negara Dai Nippon. Negara Dai Nippon berdasar atas persatuan lahir dan batin jang kekal antara Jang Maha Meleka Tennoo Heika, Negara dan Rakyat Nippon salerochane. Tennoo adalah Poesat rohani dari saleroch rakjat. Negara bersandar atas kekeluargaan. Keluarga Tennoo jang dinamakan "Kosidatu" ialah keluarga jang terencana.

Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai pula dengan tjoroknja masyarakat Indonesia. Setelah kita meninjau dengan ringkas tjembatan-tjembatan dari sifat negeri-negeri lain, maka tadi dengan sepetah dua patch kita kami mengatakan apa jang tidak sesuai dan apa jang sesuai dengan lembaga sosial (struktur social) dari masyarakat Indonesia jang asli. Sebagai teori-teori telah mengetahui djoega, "struktur sosial Indonesia jang asli tidak lain ialah tjiptaan kebudayaan Indonesia, ialah bentuk aliran pikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia.

Maka semangat kebatihan, struktur kerohanian dari bangsa Indonesia beresifat dan bertjita-tjita Persatuan hidup, Persatuan Kewelo dan Goesti (Einheitsgefühl) Persatuan antara Doenia luar dan Doenia batin, antara Mikrokosmos dan Makrokosmos, antara rakyat dan pemimpin-pemimpinja. Segala manoesia sebagai seseorang, golongan manoesia dalam sesesate masyarakat dan golongan-golongan lain dari masyarakat itoe dan tiap-tiap masyarakat dalam pergaulan hidup didoenia salerochane dianggunja nempunjai tempat dan kewajiban hidup (dharma) sendiri-sendiri manoesat koerat alam dan segala-galanya ditedjoekan kepada keluargaan lahir dan batin. Manoesia sebagai seseorang tidak terpisah dari seseorang lain atau dari doenia luar, golongan-golongan manoesia, malah segala golongan madloek, segala sesesate bertjampur baur dan bersangkut paoet, segala sesesate berpengaruh-pengaruh dan kahidupan mereka bersangkut paoet. Inilah idoe totaliter, idoe integralistik dari bangsa Indonesia, jang berwujud djoega dalam sesesate tatanegaraja jang asli. Manoesat sifat tatanegara Indonesia jang asli, jang sampai sama sekarang poen masih dapat terlihat dalam sesesate desa bali di Djawa, manoesa di Sumatra dan kepulauan-kepulauan Indonesia lain, maka para pejabat negara ialah pemimpin jang berantak-alir dengan rakyat dan para pejabat negara senantiasa berwujud memegang teguh persatuan dan keibnahan dalam masyarakatja.

Kepala desa, atau kepala rakyat berwujud menjelenggarakan keibnahan kehidupan rakyat, harus senantiasa memberi bentuk (Gestaltung) kepada rasa kehidupan dan tjita-tjita rakyat. Oleh karena itoe, kepala rakyat "memegang adat" (kata pepatah Minangkabau) senantiasa memperhatikan segala gerak-gerik dalam masyarakatja dan oentek maksud itoe, senantiasa berperantara dengan rakyatja atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desanja, agar secepa pertalian batin antara pemimpin dan rakyat salerochane senantiasa terjalin.

Dalam sesesate persatuan antara rakyat dan pemimpinja, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong-rojong, semangat kekeluargaan.

Maka terengah teori-teori jang terhormat, bahwa djika kita hendak mendirikan Negara Indonesia jang sesuai dengan keistimewaan sifat dan tjorok masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (Staatstheorie) negara jang integralistik, negara jang berasat dengan saleroch rakjatja, jang mengatasi saleroch golongan-golongannya dalam lingkungan dan alam.

Manoesat aliran pikiran ini, kepala negara dan badan-badan pemerintah lain harus beresifat manoesia jang aktif, menunduk dalam kemah tjita-tjita loeher, jang di idem-idamkan oleh rakyat. Negara harus beresifat "badan penjelenggara", badan pentjaja hekoem jang timbul dari hati sanubari rakyat salerochane. Dalam pengertian ini, Manoesat teori ini jang sesuai dengan semangat Indonesia jang asli, negara tidak lain ialah saleroch masyarakat atau saleroch rakyat Indonesia sebagai Persatuan jang kerabat dan kerjasama.

Dalam pengertian ini, negara tidak beresikap atau bertindak sebagai seseorang jang maha kuasa, jang terlepas dari seseorang-seseorang manoesia dalam daerahja dan jang nempunjai kepentingan sendiri, terlepas dari kepentingan warga-warga negeranja sebagai seseorang (faham individualis).

Teori-teori jang terhormat, manoesat pengertian "Negara" jang integralistik, sebagai bangsa jang taratoer, sebagai persatuan rakyat jang terencana, maka pada dasarnya tidak akan ada dualisme "staat dan individu", tidak akan ada pertentangan antara sesesate hekoem staat dan sesesate hekoem individu, tidak akan ada dualisme "Staat und Staatsfreie Gesellschaft", tidak akan menabebatkan djandian Grund- und Freiheitsrechte dari individu contra Staat, oleh karena individu tidak lain ialah sesesate bagian organik dari Staat, jang nempunjai kadoedekaan dan kewajiban tersendiri oentek loerat menjelenggarakan keadilan staat, dan sebaliknya oleh karena Staat bukan sesesate badan kekeluargaan atau rakasa politik jang berdiri dileuar lingkungan sesesate kemerdakaan seseorang.

Padoeka teori kutean, sawang filosof Heggeris, bernama Jeremy Bentham (akhir abad ke-18) mengdjarkan, bahwa Staat menedjies kepada "the greatest happiness of the greatest number" akan tetapi pikiran ini berdasar atas pikiran individualisme. Manoesat aliran pikiran tentang negara jang saja sangat sesuai dengan semangat

Indonesia asli tadi, negara tidak mempersatokan dirinya dengan golongan yang terbebas dalam masyarakat, pun tidak mempersatokan dirinya dengan golongan yang paling kuat (golongan politik atau ekonomi yang paling kuat), akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala seseorang, memaksa mempersatokan diri dengan segala lapisan rakyat seluruhnya.

Teman-teman yang terhormat, hendaknya dengan salah paham, teori negara integralistik atau negara totaliter ini tidak berarti bahwa negara tidak akan memperhatikan adanya golongan-golongan sebagai golongan, atau tidak akan memperdekelikan manusia sebagai seseorang. Bukan itu maksudnya! Aliran pikiran ini mempunyai sifat konkret dan real, tidak mengabstraksikan segala keadaan (seperti sifat teori individualisme).

Negara akan mengakui dan menghormati adanya golongan-golongan dalam masyarakat yang nyata, akan tetapi segala seseorang dan segala golongan akan insaf kepada kedudukan sebagai bagian organik dari negara seluruhnya, beradab mengabdikan persatuan dan harmoni antara segala bagian-bagian itu.

Negara persatuan tidak berarti, bahwa negara atau pemerintah akan menarik segala kepentingan masyarakat ke dirinya untuk dipelihara sendiri, akan tetapi memerost kelas-kelas yang "dominant" akan membagi-bagi kewajiban negara kepada badan-badan pemerintah di pusat dan daerah masing-masing atau akan menyerahkan seseorang hal untuk dipelihara oleh seseorang golongan atau seseorang orang, memerost masa, tempat dan keahlian.

Fadela teman ketosa, setelah saja menguraikan dasar-dasar, yang memerost hemat saja hendak dipikirkan untuk membangun negara Indonesia, maka saja sekarang hendak menguraikan koneksi dari teori negara tersebut terhadap pada soal-soal:

1. Perkembangan negara dan agama.
2. Tjara bentuk pemerintahan.
3. Perkembangan Negara dan kehidupan ekonomi.

Sebelumnya saja memberitarkan soal-soal ini, saja mengingatkan dahulu kepada teman-teman, bahwa bukan saja negara yang berdasar persatuan itu akan sesuai dengan tjerk masyarakat Indonesia, akan tetapi negara yang bersifat persatuan itu telah menjadi tjita-tjita pergerakan politik Indonesia pada zaman dahulu sampai sekarang.

Saja hendak mengingatkan kepada teman-teman pasal 2 dari Pantja Bharna yang telah diterima oleh Syuwa Seng In, ialah bahwa kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang merdeka, berantas. Jadi tjita-tjita ini tepat sesuai dengan tjerk masyarakat Indonesia yang asli.

Bagaimana dalam negara yang saja gambarkan tadi akan perhubungan antara negara dan agama?

Oleh anggota yang terhormat teman Moh. Hatta telah diceritakan dengan panjang lebar, bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaklah seorang negara dipisahkan

dan dari orang-orang agama. Memang disini terlihat ada dua paham, ialah: paham dari anggota-anggota ahli agama, yang menganggap bahwa Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan andjoran lain, sebagai telah diandjorkan oleh teman Moh. Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan agama, dengan lain perkataan: Bukan negara Islam. Apa sebabnya disini saja mengatakan: "bukan negara Islam"? Perkataan "Negara Islam" ialah artinya daripada perkataan "Negara berdasar atas tjita-tjita kebesaran dari agama Islam". Apakah perbedaannya akan saja terangkan. Dalam negara yang terdisebut sebagai "negara Islam", negara tidak bisa dipisahkan dari agama. Negara dan agama ialah satu, berdasar-padae.

Islam, sebagaimana teman-teman telah mengetahui, ialah sesuatu sistem agama, sosial dan politik, yang bersandar atas quran sebagai Pusat sumber dari segala sesuatu hidup manusia Islam.

Telah diceritakan, bahwa negara Turki - sekarang kita melihat lagi tjontoh-tjontoh dari negara-negara lain - sebelum saja tahun 1924 Masehi, ialah negara Islam semata-mata. Kemudian tahun 1924 Turki mengganti sifat negaranya dan bukan menjadi negara Islam lagi. Betul agama rakyat Turki ialah Islam, akan tetapi sebagai negara, memerost sistem pemerintahannya, Turki bukan negara Islam lagi. Akan tetapi negara Mesir, Irak, Iran, Saudi Arabia, ialah negeri-negeri Islam.

Apakah kita hendak mendirikan negara Islam di Indonesia?

Tadi saja mengingatkan andjoran dari Pemerintah, bahwa kita dengan memirob belaka tjontoh-tjontoh dari negara lain, akan tetapi hendaknya teman-teman mengingat kepada kreatifitas masyarakat Indonesia yang nyata. Dengan ini saja hendak mengingatkan kepada teman-teman, bahwa memerost letaknya Indonesia di dunia, Indonesia mempunyai sifat yang berkaitan dengan geografi negeri-negeri Irak, Iran, Mesir atau Syria, negara-negara yang bersifat ke-Islaman (Corpus Islamicum).

Indonesia berada di Asia Timur dan akan menjadi anggota dari lingkungan kemasyarakatan bersama di Asia Timur Raya. Dari lingkungan itu anggota yang lain-lain, misalnya negeri Nippon, Tiongkok, Hindia, Filipina, Thai, Birma, ialah bukan negara Islam. Betul peristiwa itu bukan sesuatu alasan yang dengan mendirinya harus menolak pembentukan negara Indonesia sebagai negara Islam, itu bukan. Tetapi itu sesuatu faktor penting yang harus dipikirkan juga.

Saja hendak mengingatkan juga kepada teman-teman, bahwa dinegara-negara Islam sendiri, misalnya dinegara Mesir, Iran dan Irak sampai sekarang masih ada beberapa aliran pikiran yang mempersalahkan tjara bagaimana akan menjalankan hubungan dengan kebudayaan internasional, dengan kebudayaan modern, dengan aliran zaman sekarang.

Tadi saja mengatakan, bahwa dalam negara Islam, negara tidak bisa dipisahkan dari agama, dan hukum syariah itu dianggap sebagai Perintah Tuhan untuk menjadi dasar, untuk dipakai oleh negara. Dalam negara-negara Islam, misalnya dinegara Mesir dan lain-lain yang menjadi soal, ialah apakah hukum syariah dapat dan boleh diubah, diganti, disesuaikan memerost kepentingan internasional, me-